



HUKUM TATA NEGARA

Kata Sambutan:

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
(Ketua Umum APHTN-HAN)

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
(Sekretariat Jenderal APHTN-HAN)



Tim Penulis APHTN HAN

HUKUM TATA NEGARA

**TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN**

HUKUM TATA NEGARA

Tim Penulis:

**Agus Riewanto; Andy Omara; Eka NAM Sihombing;
Isnawati; Jamaludin Ghafur; Jimmy Z. Usfunan;
Khairul Fahmi; Lita Tyesta; Mirza Nasution;
Muhammad Fauzan; Radian Salman; Rifandy Ritonga;
Sunny Unmul Firdaus; Vieta Imelda Cornelis; W.
Riawan Tjandra; Eko Mukminto**

Kata Sambutan:

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
(Ketua Umum APHTN-HAN)**

Kata Pengantar:

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
(Sekretariat Jenderal APHTN-HAN)**

Editor:

Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

**Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Agus Riewanto, dkk.

Hukum Tata Negara/Agus Riewanto, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.

xxii, 468 hlm., 23 cm.

Bibliografi: Hlm. 457

ISBN 978-623-08-0299-7

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.4180 RAJ

**Agus Riewanto | Andy Omara | Eka NAM Sihombing | Isnawati | Jamaludin Ghafur |
Jimmy Z. Usfunan | Khairul Fahmi | Lita Tyesta | Mirza Nasution | Muhammad Fauzan |
Radian Salman | Rifandy Ritonga | Sunny Unmul Firdaus | Vieta Imelda Cornelis |
W. Riawan Tjandra | Eko Mukminto**

HUKUM TATA NEGARA

Cetakan ke-1, September 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.

Setter : Khoirul Umam

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI.

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa, karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, kita masih dapat berkontribusi dan berkarya bagi perkembangan dan penguatan ilmu hukum terutama eksistensi hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara berkembang secara signifikan sejalan dengan perkembangan demokrasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pasca reformasi tahun 1998 yang diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara mendasar sebanyak empat kali yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah membawa pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap perkembangan ketatanegaraan di Indonesia baik dari segi kelembagaan negara, norma penyelenggaraan negara, maupun hubungan antara negara dan warga negara. Melalui perkembangan globalisasi dan demokrasi, relasi antara pemerintah dan warga negara semakin dinamis dan terbuka. Sehubungan dengan itu, pemahaman terhadap ilmu hukum tata negara dirasa semakin dibutuhkan mengingat esensinya dalam perkembangan negara hukum dan demokrasi di dalam suatu negara.

Saya menyambut dengan sukacita atas terbitnya buku Hukum Tata Negara yang merupakan karya yang disusun oleh para pengajar, ahli, dan pakar di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam organisasi APHTN-HAN. Dalam membaca buku ini, saya teringat terhadap salah satu pandangan presiden pertama Amerika Serikat George Washington mengenai pentingnya edukasi ilmu pemerintahan bagi generasi muda dibandingkan ilmu lainnya dalam rangka perlindungan kedaulatan negara: *“A primary object should be the education of our youth in the science of government. In a republic, what species of knowledge can be equally important? And what duty more pressing than communicating it to those who are to be the future guardians of the liberties of the country?”* Sejalan dengan itu, saya melihat bahwa buku Hukum Tata Negara ini membahas secara detail dan komprehensif berkenaan dengan aspek hukum tata negara baik dari segi teori dan prinsip ketatanegaraan, sejarah, praktik, perkembangan Hukum Tata Negara, hingga perbandingan dengan berbagai negara.

Hal yang menarik yang saya temui dalam buku ini yaitu diuraikannya perkembangan sejarah ketatanegaraan lengkap dengan teori dan prinsip ilmu hukum tata negara dari para ahli dan pakar hukum dari masa ke masa beserta penjelasan yang detil terhadap penggunaan istilah-istilah hukum tata negara hingga signifikansinya di masa kini. Saya meyakini bahwa buku Hukum Tata Negara ini dapat membawa peningkatan kualitas ilmu hukum tata negara dan membawa manfaat bagi mahasiswa hukum S1, peserta program Pascasarjana S-2 dan S-3 bidang hukum, akademisi hukum, maupun praktisi hukum. Menytir apa yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa *“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”* Sejalan dengan itu, saya meyakini pula bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga dan membuka cakrawala pengetahuan sehingga ke depannya, Insya Allah, akan semakin banyak bermunculan para ahli dan pakar hukum tata negara di Indonesia.

Semoga ikhtiar, usaha, dan gagasan yang baik dari seluruh anggota APHTN-HAN, khususnya para penulis dalam buku ini senantiasa membawa berkah bagi kemajuan ilmu hukum tata negara, bermanfaat bagi kita semua, dan juga bagi bangsa dan negara. Maju terus APHTN-HAN, bangga kami. Selamat membaca.

Wallahu muafik ilamintariq.

Wassalaamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.





KATA PENGANTAR

Pertama-tama, selaku anggota keluarga besar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang tengah diberi kepercayaan sebagai sekretaris jenderal, saya merasa lega dan berbahagia atas terselesaikannya buku ini. Buku “*Hukum Tata Negara*” yang para pembaca sekalian pegang adalah hasil *keroyokan* para pendekar hukum di APHTN-HAN yang dikerjakan secara gotong-royong. Rasanya sepak terjang kepakaran pengetahuan keilmuan hukum mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau diibaratkan dalam bahasa hukumnya, kepiawaian mereka sudah jaminan mutu, *notoire feiten*.

Kalau dicermati lagi, sebetulnya telah banyak terdapat buku *babon* dengan topik yang sama. Misalkan 2 (dua) jilid “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” dari Prof. Jimly Asshidiqqie, maupun yang ditulis oleh sejumlah cerdik-cendikia di berbagai kampus. Kehadiran “*Hukum Tata Negara*” dari APHTN-HAN, bagi saya, merupakan kolaborasi yang diharapkan memperkaya khasanah hukum tata negara dari literatur yang ada. Jika selama ini para pengajar yang bergabung dalam APHTN-HAN baru berhasil menyusun Rencana Pembelajaran Studi (RPS) yang digunakan bersama, maka saat ini RPS tersebut telah berhasil dikembangkan menjadi buku yang dapat dijadikan pegangan bersama.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia *toh* memang dinamis. Selaku pribadi yang turut bergelut di kampus, terasa betul bahwa

materi yang diajarkan sebelumnya lekas jadi usang. Mau tidak mau bahan kuliah harus terus disempurnakan. Peristiwa hukum, model penafsiran, hingga teori-teori baru tidak berhenti bermunculan. Bukan hanya hukum yang jalan tertatih mengikuti kenyataan, tapi juga para pengajarnya juga ikut tertatih dalam mengikuti perkembangan terkini.

Taruhlah soal peraturan perundang-undangan. Masih belum terlalu lama pembuatan regulasi, menurut ajaran klasik, dianggap bukan bagian ilmu hukum. Penyusunan regulasi adalah proses politik. Baru kemudian belakangan mulai dikenal suatu pemikiran tentang *legisprudence* yang mempopulerkan bahwa proses penyusunan regulasi adalah bagian dari ilmu hukum pula, yakni ilmu perundang-undangan. Permisalan lain tentang pemahaman pembagian-pemisahan kekuasaan dari *trias-politica* yang pada situasi kontemporer dianggap kurang mencukupi hingga lahir konsep *quadro-politica*. Itu baru tataran konsep. Ranah yang lebih praksis tentu akan mengalami perubahan yang lebih cepat lagi, entah itu karena adanya regulasi baru, putusan pengadilan, perkembangan politik-hukum, dan lain sebagainya.

Terlepas dari itu, terdapat sebuah petuah lama yang dahulu sering disampaikan oleh para guru, tetua, maupun senior: bahwa ketika menghadapi kesukaran agar selalu ingat kembali ke akar. Seberapa kokoh bangunan tergantung dari kekuatan pondasi yang disusun. Ungkapan barusan tidak keliru. Agak sukar membayangkan proses belajar-mengajar di kampus dengan secara serta merta mengenalkan ilmu hukum (terlebih hukum tata negara) tanpa merunut ke belakang konsep-konsep dasar maupun rangkaian latar historisnya. Karenanya suatu bahan yang sifatnya mendasar tadi senantiasa selalu relevan dan dibutuhkan.

Sedari awal "*Hukum Tata Negara*" diniatkan sebagai sumbangsih APHTN-HAN pada pengembangan dan pengajaran ilmu hukum tata negara di Indonesia. Semangat itu tercermin dari keluasan cakupan topik yang merupakan ikhtiar untuk menyajikan hukum tata negara secara elementer. Bentang tema mulai dari dasar-dasar hukum tata negara hingga tentang perubahan konstitusi. Konsekuensinya tentu saja berdampak pada jumlah halaman yang mencapai lebih dari lima ratus halaman. Kalau diingat lagi sedikit ke belakang, tebal buku itu sendiri sudah merupakan hasil kompromi, buah diskusi -dan kadang diselengi sedikit perdebatan- dari para tim penulis tentang apa yang

perlu dimasukkan dan apa yang tidak. Pada sisi yang lain, proses penyusunan yang demikian sekaligus memperlihatkan betapa dinamis, dialogis, dan egaliternya ekosistem tradisi akademik di APHTN-HAN yang mengusung nilai inklusif, kolegalitas, altruistik dan kontributif.

Terakhir, selamat untuk Agus Riewanto, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, Lita Tyesta, Mirza Nasution, Muhammad Fauzan, Radian Salman, Rifandy Ritonga, Sunny Unmul Firdaus, Vieta Imelda Cornelis, dan W. Riawan Tjandra, Eko Mukminto selaku penulis. Kepada tim editor yang dipimpin Rofi Wahanisa telah menjadikan buku ini semakin baik dan enak dibaca. Juga untuk ketua umum APHTN-HAN, Prof. Dr. M Guntur Hamzah. Lebih dari itu semua, semoga menjadi karya yang terus hidup, sebagaimana “*International Law*” dari Malcolm N. Shaw yang menjadi pegangan berbagai universitas lintas benua dan terus mengalami perbaikan di tiap edisi. Saya *haqul yaqin* kerja keras yang telah dilalui akan memberi banyak manfaat buat orang banyak, menjadi *jariyah* yang tidak putus-putus.

Jember, 2023

Bayu Dwi Anggono

Sekretaris Jenderal APHTN-HAN

Guru Besar dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
(FH UNEJ)



PRAKATA

Atas kebesaran rahmat dan karunia dari Allah Swt, akhirnya Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (PP APHTN-HAN) dapat menuntaskan penulisan buku berjudul: **Hukum Tata Negara** dan dapat hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Buku ini ditulis secara kolegal oleh 15 orang dosen senior dan berpengalaman yang mengampu mata kuliah HTN-HAN dari Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar hampir seluruh Indonesia.

Buku ini terdiri dari 17 Bab yang pembahasannya dimulai dari Bab 1. Dasar-Dasar Hukum Tata, dibahas tentang konsep dasar ilmu HTN hingga hubungannya dengan ilmu-ilmu lain dalam rumpun ilmu sosial. Bab 2. Sumber Hukum Tata Negara dibahas tentang darimana dan apa yang menjadi sumber pokok HTN. Bab 3. Sejarah Perkembangan Materi Muatan Konstitusi Indonesia dan Konstitusionalisme, dibahas tentang konsep konstitusi hingga urgensi konstitusionalisme. Bab 4 Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dibahas tentang perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasaan hingga aspek vertikal dan horizontal dalam pemisahan kekuasaan.

Bab 5. Sistem Pemerintahan Negara, di bahas tentang konsep sistem pemerintahan hingga sejarah praktik sistem pemerintahan

Indonesia. Bab 6. Prinsip Demokrasi dan Konsepsi negara Hukum serta keberadaanya dalam UUD 1945, dibahas tentang prinsip-prinsip demokrasi hingga praktik kualifikasi negara hukum demokratis. Bab 7. Lembaga Perwakilan Menurut UUD 1945, dibahas tentang konsep lembaga perwakilan hingga lembaga perwakilan nasional dan daerah. Bab 8. Kekuasaan Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945, dibahas tentang konsep kekuasaan pemerintahan hingga lembaga TNI dan Polri dalam ketatanegaraan.

Bab 9. Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan yang Berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman, dibahas tentang konsep kekuasaan kehakiman hingga wewenang rekrutmen lembaga kehakiman. Bab 10. Perkembangan Lembaga Negara, dibahas tentang konsep lembaga negara hingga lembaga negara dalam UUD 1945. Bab 11. Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dibahas tentang konsep peraturan hingga model pengujiannya. Bab 12 Mekanisme Kontrol, norma Melalui Pegujian Peraturan Perundang-Undangan dibahas tentang mekanisme pengujian pearturan perundang-undangan.

Bab 13 Pemilihan Umum, dibahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, partai politik, penyelenggara pemilu hingga lembaga penyelesaian sengketa Pemilu. Bab. 14. Hukum Keuangan Negara dibahas tentang konsep dan ruang lingkup keuangan negara hingga struktur dan Siklus APBN. Bab 15. Pemerintahan Daerah dan Hubungannya dengan Pemerintahan Pusat dibahas tentang prinsip negara kesatuan dan hubungannya dengan pusat dan daerah. Bab 16. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dibahas tentang sejarah pemikiran HAM hingga HAM dalam UUD 1945 dan Bab 17. Perubahan Konstitusi dibahas tentang kelembagaan konstitusi hingga perubahan konstitusi.

Kehadiran buku ini sangat urgen karena selama ini pengajaran mata kuliah HTN-HAN di FH masih sangat beragam baik sub tema-temanya hingga materinya, karena perkembangan ilmu HTN sangat pesat, namun demikian PP APHTN-HAN sebagai wadah organisasi pengajar merasa terpanggil secara moral untuk menyusun kurikulum dan silabus mata kuliah HTN-HAN dan berlanjut dituangkan dalam bentuk materi buku ini.

Buku ini diharapkan akan menjadi referensi pengajaran mata kuliah HTN-HAN yang seragam di FH di seluruh Indonesia sehingga dapat menyeragamkan materi pengajaran pada mahasiswa. Karena

dalam praktik selama ini materi pengajaran HTN-HAN tidak seragam akibatnya acapkali terjadi kesenjangan materi bahan ajar HTN-HAN antar perguruan tinggi yang ada di pulau Jawa dan pulau luar Jawa.

Oleh karen itu, kehadiran buku ini pasti dinantikan oleh kolega dosen, mahasiswa, pemerhati dan praktisi HTN-HAN di seluruh Indonesia. Karena akan dapat memantik dan menebarkan pengembangan dan riset-riset bidang ilmu HTN-HAN pada isu-isu paling mutakhir sebagai ilmu yang penting untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Sebagai negara besar dengan sejarah yang panjang, Indonesia tentu saja memiliki materi HTN-HAN yang bersumber dari praktik dan epos bernegara selama ini yang unik sehingga dapat menjadi laboratorium dan sumber referensi mutiara manikan yang indah dan elok menjadi solusi kreatif guna memecahkan berbagai masalah HTN-HAN aktual dan amat pelik dalam praktik berbangsa dan bernegara hari ini dan di masa depan.

PP APHTN-HAN sebagai rumah besar pengajar HTN-HAN di Indonesia tentu saja diharapkan akan menjadi *pioneer* dan *avant garde* terdepan bagi tumbuh kembagnya ilmu HTN-HAN. Itulah sebabnya mengapa untuk membesarkan organisasi PP APHTN-HAN ini memerlukan kerjasama, bahu membahu antar pengajar HTN-HAN guna terus menurun melahirkan pemikiran-pemikiran besar melaui riset dan produk karya ilmiah baik buku maupun jurnal yang berkualitas agar pada masa depan produk-produk riset ilmiah PP APHTN-HAN akan menjadi acuan dan rujuan masyarakat Internasional dalam perkembangan ilmu HTN-HAN di dunia.

Demikianlah, buku ini tentulah tidak sempurna karena itu masih sangat perlu saran, kritik dan perbaikan di masa mendatang. Semoga buku produk PP APHTN-HAN yang pertama ini akan terus disusul oleh produk-produk lainnya yang kian berkualitas. Besar harapan buku ini akan dapat bermanfaat dan kepada para penulis akan dilimpahi Allah Swt pahala *jariah* yang berlipat.

Jakarta, Medio September 2023

Atas Nama Tim Penulis

ttd

Agus Riewanto



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
PENGANTAR	ix
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 DASAR-DASAR HUKUM TATA NEGARA	1
A. Istilah Hukum Tata Negara	1
B. Pengertian Hukum Tata Negara	3
C. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	5
D. Kedudukan Hukum Tata Negara dalam Pembagian Ilmu Hukum	7
E. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik dan Hukum Administrasi Negara	8
BAB 2 SUMBER HUKUM TATA NEGARA	17
A. Istilah dan Pengertian Sumber Hukum	17
B. Penggolongan Sumber Hukum	20
C. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara (HTN) Indonesia	24
	xvii

BAB 3	SEJARAH PERKEMBANGAN MATERI MUATAN KONSTITUSI INDONESIA DAN KONSTITUSIONALISME	57
	A. Definisi dan Klasifikasi Konstitusi	57
	B. Metode Perubahan Konstitusi	84
	C. Nilai Konstitusi	92
	D. Urgensi Konstitusionalisme	94
BAB 4	PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	103
	A. Perbedaan Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	106
	B. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal	109
	C. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	112
BAB 5	SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA	117
	A. Pengertian Sistem Pemerintahan	117
	B. Pembagian Sistem Pemerintahan	119
	C. Sistem Pemerintahan Dalam Konstitusi Indonesia	128
BAB 6	PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSEPSI NEGARA HUKUM SERTA KEBERADAANNYA DALAM UUD 1945	141
	A. Prinsip Demokrasi	141
	B. Negara Hukum	151
	C. Negara Hukum yang Demokratis	163
BAB 7	LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	175
	A. Pengertian Lembaga Perwakilan	175
	B. Perkembangan Lembaga Perwakilan Indonesia	181
	C. Kekuasaan dan Fungsi Lembaga Perwakilan	185
	D. Lembaga Perwakilan Nasional dan di Daerah	188

BAB 8	KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945	211
A.	Pengertian Kekuasaan Pemerintahan Negara	211
B.	Presiden, Wakil Presiden dan Lembaga Kepresidenan	213
C.	Presiden: Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	215
D.	Perkembangan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Konstitusi	216
E.	Kementerian Negara	218
F.	Dewan Pertimbangan	219
G.	Kejaksaan	220
H.	TNI dan Polri	221
BAB 9	KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN Kekuasaan YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN	227
A.	Pengertian Kekuasaan Kehakiman	227
B.	Karakteristik Kekuasaan Kehakiman	228
C.	Latar belakang Pembentukan, wewenang Pengisian Jabatan dalam Lembaga Kehakiman	230
BAB 10	PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA	241
A.	Lembaga Negara	241
B.	Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945	243
C.	Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)	259
BAB 11	SISTEM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	261
A.	Pengertian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	264
B.	Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	266

C. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Pengenalan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	274
D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	277
BAB 12 MEKANISME KONTROL NORMA MELALUI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	283
A. Peraturan Perundang-Undangan	283
B. Pengujian Undang-Undang Sebagai Bentuk Kontrol Norma	292
BAB 13 PEMILIHAN UMUM	315
A. Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pemilu	315
B. Jenis Pemilu	319
C. Partai Politik	321
D. Penyelenggara Pemilu	325
E. Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Hasil Pemilu	329
F. Lembaga dan Aparat Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu	330
G. Hukum Materil Penyelesaian Sengketa Pemilu	331
H. Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Pemilu	332
BAB 14 HUKUM KEUANGAN NEGARA	335
A. Dasar Pemikiran	335
B. Pengertian, Ruang Lingkup dan Pendekatan Dalam Merumuskan Pengertian Keuangan Negara	336
C. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara	340
D. Paket Undang-undang Keuangan Negara dan Implikasinya	341
E. Struktur Pengelola Keuangan Negara	343
F. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran	346
G. Struktur APBN dan Siklus APBN	349

BAB 15 PEMERINTAHAN DAERAH DAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH	357
Prinsip Negara Kesatuan dan Hubungan Pusat dan Daerah	357
BAB 16 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI	421
A. Awal Pemikiran HAM dan pencantumannya dalam UUD 1945	424
B. HAM dalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (KRIS 1949)	428
C. HAM dalam UUD Sementara 1950	429
D. HAM dalam Sidang Pembentukan UUD oleh Dewan Konstituante 1956-1959	435
E. HAM dalam Perubahan UUDNRI (1999-2002)	436
BAB 17 PERUBAHAN KONSTITUSI	443
A. Kelembagaan Konstitusi	443
B. Mekanisme Pembentukan dan Perubahan	448
C. Klausal Tidak Dapat Diubah dalam Konstitusi	454
DAFTAR PUSTAKA	457